

Takalar pada Masa NIT, 1946-1950

Kurniawan Syamsuddin; Najamuddin; Asmunandar

Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
kurniawansyam027@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi masyarakat Takalar terhadap keberadaan NIT, kondisi masyarakat Takalar pada masa NIT, dan dampak keberadaan NIT terhadap masyarakat Takalar. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik dengan menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu heuristik (mencari dan mengumpulkan sumber), kritik sumber (ekstern dan intern), interpretasi (penafsiran sumber) dan historiografi (penulisan sejarah). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan penelitian pustaka atau diambil dari sumber tertulis, yakni buku, jurnal, makalah dan hasil riset yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi masyarakat takalar menolak adanya Negara Boneka Belanda yaitu Negara Indonesia Timur (NIT) ditunjukkan dengan berbagai tindakan yang dilakukan seperti melakukan pertemuan dengan berbagai pemimpin kelaskaran dari beberapa daerah untuk membentuk sebuah wadah perjuangan. Untuk mendukung pertemuan tersebut para pemuda melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda. Kondisi masyarakat Takalar pada masa NIT dapat digambarkan dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan di Takalar. Bentuk perjuangannya adalah fisik dan non fisik. Serangan-serangan yang dilakukan para pejuang baik untuk mempertahankan kubu perjuangan maupun menyerang markas pihak musuh menjadi perjuangan fisik yang dilakukan sebagai upaya penolakan kembalinya pemerintahan dan berdirinya NIT. Sedangkan perjuangan non fisik dalam hal ini ialah segala usaha yang telah ditempuh oleh para pejuang dalam rangka mencapai tujuan, dilakukan bukan dengan perang, baik semasa gerakan Muda Bajeng maupun sesudah Gerakan Lipan Bajeng. Keberadaan NIT di Takalar memberikan dampak bagi masyarakat dari segi politik, ekonomi hingga setelah NIT dibubarkan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa kedatangan NICA di Takalar hingga terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) mendapat penolakan keras dari masyarakat dan pejuang-pejuang yang ada di Takalar.

Kata Kunci: Negara Indonesia Timur, Takalar, NICA

Abstract

This study aims to determine the reaction of the Takalar community to the existence of NIT, the condition of the Takalar community during the NIT period, and the impact of the existence of the NIT on the Takalar community. This research is descriptive analytical using historical research methods, namely heuristics (finding and collecting sources), source criticism (external and internal), interpretation (interpretation of sources) and historiography (historical writing). Data collection methods are carried

out by conducting interviews and library research or taken from written sources, namely books, journals, papers and related research results. The results showed that the reaction of the Takalar community to reject the existence of the Dutch Puppet State, namely the State of East Indonesia (NIT) was indicated by various actions taken such as holding meetings with various class leaders from several regions to form a forum for struggle. To support the meeting, the youths carried out attacks on Dutch posts. The condition of the Takalar community during the NIT period can be described from the struggles carried out by the fighters to maintain independence in Takalar. The form of struggle is physical and non-physical. The attacks carried out by the fighters both to defend the struggle fort and attack the enemy's headquarters became a physical struggle carried out as an effort to reject the return of the government and the establishment of the NIT. While the non-physical struggle in this case is all the efforts that have been taken by the fighters in order to achieve their goals, carried out not by war, both during the Muda Bajeng movement and after the Centipede Bajeng Movement. The existence of the NIT in Takalar has an impact on the community in terms of politics, economy, until after the NIT was dissolved. Based on the results of the study, it can be concluded that the arrival of NICA in Takalar until the formation of the State of East Indonesia (NIT) was strongly rejected by the community and fighters in Takalar.

Keywords: Eastern Indonesia, Takalar, NICA

A. PENDAHULUAN

Revolusi nasional Indonesia timbul karena perasaan tidak aman dan penuh kegelisahan yang menyangkut soal kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Revolusi itu berhasil menumbangkan pemerintahan lama yang kemudian diganti dengan pemerintahan baru. Penumbangan itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 saat Soekarno dan Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan proklamasi itu maka Pemerintah Jepang segera diganti dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Pernyataan proklamasi yang diumumkan ke seluruh dunia menjadikan bangsa Indonesia berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa merdeka di dunia. (Marthabaya, 1987)

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda bergegas kembali ke Indonesia. Kehadirannya itu mendapat penolakan dari sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga H. J. van Mook, wakil pemerintah Belanda di Indonesia merancang suatu strategi politik untuk memulihkan kembali kedudukan kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah bekas jajahannya (Hindia Belanda), termasuk di Sulawesi Selatan. Strategi politik itu dikenal dengan gagasan negara federal. Atas kebijakan Sekutu yang menempatkan NICA (Netherlands Indische Civil Administratie) sebagai bagian integral dari pasukan Australia (wakil Sekutu) di Sulawesi Selatan, aparat-aparat NICA berhasil mempengaruhi sebagian tokoh politik dan raja-raja di daerah ini untuk bekerjasama guna mewujudkan gagasan negara federal. (Amir, 2010.)

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji Takalar Pada Masa NIT (1946-1950) dan mencoba mengungkapkan bagaimana kemudian kedatangan NICA di Sulawesi Selatan, Terbentuknya NIT Mulai dari konferensi Malino hingga konferensi Denpasar, Terbentuknya LAPRIS sebagai wadah dalam upaya penolakan berdirinya NIT hingga pada dibubarkannya

RIS dan Negara Indonesia Timur (NIT) juga dinyatakan bubar. Selain itu alasan penulisan ingin mengkaji mengenai Takalar Pada Masa NIT karena Polombangkeng dijadikan sebagai pusat gerakan menggantikan posisi Makassar yang pada saat itu sudah tidak aman, Polombangkeng menjadi pusat bersatunya para tokoh pemuda perjuangan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian, banyak cara yang dilakukan oleh para peneliti baik berdasarkan proses, prosedur, maupun prinsip yang dianut. (Ahmadin, 2013) Dengan demikian, berdasarkan atas tujuan dan kategori data yang dibutuhkan, menyebabkan terjadinya perbedaan metode yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian, salah satunya yaitu penelitian sejarah.

Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, harus melalui prosedur kerja sejarah. Secara sederhana penulisan sejarah dapat dijelaskan beberapa tahapan kerja yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. (Helius Sjamsuddin, 2007) sesuai dengan metode penelitian sejarah yang disebutkan sebelumnya, maka adapun langkah-langkah atau tahapan dalam penulisan sejarah akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut

1. Heuristik

Tahap ini merupakan tahap mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan diarahkan pada pencarian dan pengumpulan sumber yang berkaitan dengan masalah atau objek yang akan dikaji, yaitu "Takalar Pada Masa NIT (1946-1950)". Proses mengumpulkan sumber dalam mengkaji dan menyusun penelitian ini menekankan pada kajian pustaka/library research dan wawancara.

Sebelum menentukan teknik pengumpulan sumber sejarah, pertama-tama yang perlu dipahami adalah bentuk dari sumber sejarah yang akan dikumpulkan. Penentuan sumber sejarah akan mempengaruhi tempat (dimana) atau siapa (sumber informasi lisan) dan cara memperolehnya. Sumber sejarah dibedakan atas sumber tulisan, lisan dan benda. Sumber-sumber itu sendiri ada dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dari topik penelitian, misalnya arsip, dokumen, sumber lisan, dan sumber benda. Adapun sumber sekunder merupakan sumber pelengkap, seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian (skripsi).

Dalam melakukan pengumpulan sumber, menempuh dua cara yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian Pustaka
- b. Penelitian Lapangan

2. Kritik Sumber

Setelah memperoleh sumber-sumber yang cukup memadai, selanjutnya dilakukan kritik (penyaringan) terhadap sumber tersebut. Kritik terhadap sumber bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta yang seobyektif mungkin, sehingga karya sejarah yang dihasilkan merupakan produk dari proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hasil dari suatu fantasi maupun manipulasi. (Sjamsuddin, 2012) Ketika melakukan kritik sumber, dua hal penting yang harus dilakukan, yakni kritik otentisitas (kritik ekstern) dan kritik kredibilitas (kritik intern).

Kritik ekstern adalah suatu penelitian atas asal-usul dari sumber, suatu pemeriksaan atas catatan atau peninggalan itu sendiri untuk mendapatkan semua informasi yang mungkin, dan untuk mengetahui apakah pada suatu waktu sejak

asal mulanya sumber itu telah diubah oleh orang-orang tertentu atau tidak. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang lain atau pada waktu ini dan kesaksian yang telah diberikan itu telah bertahan tanpa ada perubahan, tanpa ada suatu tambahan-tambahan atau penghilangan-penghilangan substansial.

Kritik intern menekankan aspek "dalam" yaitu isi dari sumber: kesaksian. Setelah fakta dari kesaksian ditegakkan melalui kritik eksternal, tiba gilirannya sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan apakah kesaksian itu dapat diandalkan atau tidak.

3. Interpretasi

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (facts) atau bukti-bukti sejarah (evidences). Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi (witness) realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi bisu belaka. Fakta-fakta atau bukti-bukti dan saksi-saksi sejarah itu tidak bisa berbicara sendiri mengenai apa yang disaksikannya dari realitas masa lampau. (Daliman., 2018)

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau. Fakta-fakta sejarah yang jejak-jejaknya masih Nampak dalam berbagai peninggalan dan dokumen hanyalah merupakan sebagian dari fenomena realitas masa lampau, dan yang harus disadari bahwa fenomena itu bukan realitas masa lampau itu sendiri.

4. Historiografi

Sejarah adalah pertanggung jawaban masa silam. Dalam pertanggungjawaban tersebut manusialah yang menentukan arti masa silam itu. Artinya masa silam bukanlah masa silam sebagai tabula rasa. Melainkan masa silam bukanlah lembaran-lembarannya telah ditulis manusia dengan tindakan-tindakannya. (kartodirdjo, 2015) Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah baru dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah yang dijamin keabsahannya setelah melalui seluruh rangkaian metodologi penelitian sejarah, disinilah pentingnya historiografi atau penulisan sejarah sebagai tahap akhir dari penelitian sejarah.

Setelah data yang diperoleh dikritik, diinterpretasikan lalu disintesa dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari rangkaian metode historis. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi adalah hal yang sangat penting, dengan demikian urutan kejadian merupakan kunci pokok dalam penulisan sejarah. Pada tahap ini penulis akan menuliskan peristiwa sejarah tersebut dalam sebuah tulisan yang dalam penulisan, pemaparan dan pelaporan menggunakan tata cara tertentu. Dimana dalam hal ini, penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian dengan kajian kepustakaan dan lapangan. Sebagaimana dengan laporan karya penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah seharusnya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhir (penarikan kesimpulan).

C. TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Salah satu kegiatan dalam penulisan karya ilmiah yang patut dilakukan adalah proses kegiatan tinjauan pustaka. Dimana tinjauan pustaka ini merupakan suatu langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian-kajian teoritis dan kajian metodologi. Tinjauan pustaka sendiri bertujuan sebagai pendukung, penguat, maupun pembenaran terhadap data yang telah ditemukan.

Pada umumnya penulisan mengenai kajian Negara Indonesia Timur telah banyak dilakukan, hal ini dilihat dari buku dan tulisan karya ilmiah yang kemudian

menjadi literatur seperti Skripsi karya Leonardo (2007) dengan judul Pembentukan dan Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat (1949-1950). Skripsi ini membahas tentang proses pengembalian Pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta, Pengakuan kedaulatan kepada RIS hingga dampak politik dan militer terhadap RIS serta pembubaran RIS. (Leonardo, 2007)

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Amir pada kajiannya tentang Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang latar belakang proses dan pembentukan NIT, penataan pemerintahan NIT hingga kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Amir, "Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950", 2010)

Jurnal yang ditulis Oleh Najamuddin dan Bustan pada kajiannya tentang Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950. Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang lahirnya ide-ide "Negara Federal" NIT, perkembangan ide federalisme di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan hingga terbentuknya NIT. (Najamuddin, 2017)

Buku yang ditulis oleh Anak Agung Gde yang berjudul Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia yang terbit pada tahun 2008. Karya Anak Agung membahas NIT, sejak berdirinya sampai diintegrasikan ke dalam Negara Kesatuan Indonesia. Namun penjelasan Anak Agung lebih sebagai pengalaman petualangan berpolitik selama periode itu. Buku ini membahas dinamika politik Negara Indonesia Timur. NIT adalah salah satu Negara bagian dari Negara Federal Hindia yakni Gemeenebest (suatu Negara Persemakmuran) di bawah Ratu Belanda. Di sepanjang keberadaannya ditandai dengan dinamika politik berupa jatuh bangunnya kekuasaan kabinet-kabinetnya sebagai dampak perjuangan politik antara yang pihak yang pro Hindia Belanda dengan pihak yang memihak negara Kesatuan Indonesia. (Gde., 1985)

D. PEMBAHASAN

1. Kedatangan NICA di Sulawesi Selatan

Kemenangan pihak sekutu terhadap bala tentara Jepang dikunci dengan dua pemboman dahsyat, yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 8 Agustus 1945. Kaisar Hirohito di Tokyo mengumumkan penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

Setelah Jepang menyatakan diri kalah dalam perang pasifik, maka pasukan sekutu mendapat tugas untuk:

- a. Membebaskan secepat mungkin tawanan perang.
- b. Melucuti tentara Jepang yang telah menyerah dan mengirimkan mereka ke Pelabuhan (deportasi) agar secepat mungkin diberangkatkan ke Jepang.
- c. Menciptakan ketertiban hukum dan keamanan sehingga dapat diwujudkan penyerahan kekuasaan yang tertib dari kekuasaan militer Inggris kepada pemerintah sipil dari penguasa yang secara sah berkuasa di wilayah itu.
- d. Dalam hubungan ini wilayah Indonesia juga akan merupakan daerah kegiatan pasukan Sekutu untuk memenuhi tugas itu, karena pada waktu Perang Pasifik, wilayah itu berhasil diduduki tentara pendudukan Jepang. (Harun Kadir, 1984)

Dengan mulai tibanya pihak Sekutu guna menerima penyerahan Jepang maka muncullah tantangan-tantangan serius yang pertama terhadap Revolusi. Kemajuan yang dicapai Amerika melalui samudera Pasifik telah mentelantarkan daerah-daerah kantong Sekutu di Kalimantan (Tarakan dan Balikpapan), di Morotoai, dan di bagianbagian Irian Jaya. Para pejabat Belanda sudah kembali ke daerah-daerah tersebut. Pada akhir bulan Juni 1945 satuan-satuan komando kecil

(sebagian besar terdiri dari orang-orang Belanda, tetapi disertai beberapa perwira Inggris) juga telah diterjunkandi Sumatera Utara.

Setelah Jepang menyerah kepada pihak Sekutu, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, Amerika Serikat menguasai Philipina dan tentara Inggris dalam bentuk South East Asia Command (SEAC) bertanggung jawab atas India, Burma, Srilanka, Malay, Sumatra, Jawa dan Indocina. SEAC dengan Panglima Lord Mountbetten sebagai komando tertinggi Sekutu di Asia Tenggara bertugas melucuti senjata bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil Sekutu Recovered Allied Prisoners Of War and Internees (RAPWI).

Di wilayah yang dikuasai angkatan laut Jepang Revolusi terhenti pada awalnya ketika pihak Sekutu bergerak masuk. Pasukan-pasukan Australia menerima penyerahan Jepang di sana (terkecuali untuk Bali dan Lombok) dan bersama-sama dengan mereka itu datanglah pasukan-pasukan dan pejabat-pejabat Belanda. Antarpertengahan bulan September dan pertengahan bulan Oktober 1945 pihak Australia menduduki kota-kota besar di Indonesia Timur yang pada umumnya berlangsung sebelum terbentuknya pemerintahan-pemerintahan Republik. Demonstrasi-demonstrasi dipadamkan dan beberapa pejabat yang pro-Republik memutuskan bahwa akan tidak bijaksana apabila melawan tentara Australia, sehingga dengan berat hati terpaksa membiarkan saja kembalinya orang-orang Belanda. (Ricklefs, 1994.)

Pada tanggal 21 September 1945, rombongan tentara Australia yang pertama yang berada dibawah pimpinan Brig. Jend. Ivan Dougherty, satu bagian dari brigade ke-21 tentara Australia mendarat di Makassar. Tentara Australia itu mendarat dengan aman dibawah jaminan keamanan oleh pemuda-pemuda. Namun tidak lama kemudian sikap pemuda mulai berubah ketika diketahui bahwa sebagian dari tentara Australia itu adalah personil NICA dibawah pimpinan Mayor J.G Wegner. Wagner mulai bergiat mengambil alih pemerintahan Sipil dari tangan Jepang, dan mulai bertindak atas nama pemerintahan yang sah. Personil NICA selanjutnya diperintahkan untuk melaksanakan tugas guna menegakkan kembali pemerintahan sipil Hindia Belanda di Makassar. Ia bertindak secara sepihak mengangkat kembali bekas pegawai Hindia Belanda untuk menduduki jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan itu sebelumnya pada masa pendudukan Jepang. Ia juga menyatakan tidak berlaku lagi uang Jepang, dan sebagai penggantinya dikeluarkannya Uang NICA, mempersenjatai orang-orang Belanda, Indo-Belanda dan Ambon yang baru dibebaskan dari tahanan, mendemonstrasikan arak-arakan mobil sambil menyanyikan lagu rakyat Belanda, dan banyak hal lagi yang sengaja dilakukan untuk dapat menciptakan amarah rakyat Makassar.

Setelah pemerintahan baru dibentuk, Gubernur Sulawesi G.J.S Ratulangi kembali ke Makassar pada 19 Agustus 1945. Setibanya di sana, dia membentuk struktur pemerrintahan baru dan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh lokal, terutama kaum bangsawan untuk mendapatkan dukungan. Pada sisi lain, pimpinan militer Sekutu dari Australia di Makassar, F.O. Chilton memerintahkan Ratulangi agar tidak menjalankan fungsinya. Perintah ini disertai ancaman penangkapan bila tidak dilaksanakan. Ancaman serupa dialamatkan kepada para pendukung republik, bahwa mereka yang tidak mengindahkan instruksi, sesuai Ma'loemat 29 Oktober 1945, akan ditembak mati di tempat. (Abd. Rahman hamid, 2016.)

Kedudukan Belanda di Makassar semakin kuat ketika markas besar NICA dipindahkan dari Morotoai ke Makassar, dan saat pasukan Inggris menggantikan

pasukan Australia, serta satuan-satuan KNIL (Koninklijke Nederlandsche Indische Leger) dihimpun kembali. Pada tanggal 21 November 1945 Sekutu mengeluarkan suatu perintah kepada para komandan daerah yang dengan tegas menyatakan bahwa NICA adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pasukan Sekutu dan setiap kegiatan atas nama pemerintah republik harus dilarang diikuti dengan suatu instruksi.

Sejak diketahui bahwa Indonesia diantara pasukan Sekutu yang datang ke Makassar terdapat personil NICA, rakyat yang berada di Kota Makassar melancarkan protes dengan melakukan demonstrasi pengibaran bendera Merah Putih tanggal 27 September 1945. Pemuda-pemuda hilir mudik dengan mengenakan lencana merah putih sambil melancarkan tindakan perlawanan terhadap kegiatan NICA. Akibat tindakan protes itu, maka tanggal 1 Desember 1945 diadakan suatu pertemuan, NICA memandang pertemuan akan memperoleh dukungan dari raja-raja lokal. Meskipun berbagai cara telah ditawarkan, namun raja-raja tetap menolak kehadiran NICA, bahkan bersedia dipecat dari pada harus menerima dan mengakuinya. Raja-raja yang menolak adalah Raja Bone, Gowa, Luwu. Sementara itu, tekanan-tekanan ekonomi sudah mulai dimanfaatkan oleh NICA, yaitu diawali dengan penguasaan distribusi kain, makanan serta pemberlakuan kembali mata uang NICA, dengan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Apalagi pada akhir Mei dan Juni 1946 kekuasaan atas Pulau Jawa secara resmi dialihkan dari Satuan Komando Asia Tenggara ke Pemerintah Hindia Belanda.

Sebagian besar penguasa di Sulawesi Selatan tidak mentaati pemerintah NICA, meskipun ada juga yang pro-Belanda. Itulah sebabnya berbagai organisasi perjuangan di Sulawesi Selatan terbentuk seperti SUDARA (Sumber Darah Rakyat), PRI (Penunjang Republik Indonesia), PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia) yang didirikan tanggal 11 Oktober 1945 yang merupakan ujung tombak gerakan pemuda yang dilancarkan tanggal 29 Oktober 1945 di Kota Makassar terhadap markas-markas PNI (Pemuda Nasional Indonesia), BPRI (Badan Penunjang Republik Indonesia), Lipang Bajeng, Gerakan Muda Bajeng, dan LAPRIS (Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) yang merupakan gabungan dari 19 kelaskaran di Sulawesi Selatan, kelaskaran dibentuk karena selama ini berjuang secara terpisah di daerah masing-masing, dengan tujuan yang sama untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan dan menghancurkan NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan dan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam suatu wadah. (Bahtiar, 2014)

2. Terbentuknya NIT:

a. Konferensi Malino 1946

Usaha untuk merealisasikan gagasan "politik federal" Belanda bagi wilayah Hindia Belanda yang telah memproklamasikan kemerdekaan mendorong H.J. van Mook, perancang politik federal itu, menempatkan Sulawesi Selatan dan pulau-pulau di bagian timur Indonesia sebagai basis. Sehubungan dengan rencana tersebut maka direncanakan pelaksanaan konferensi bersama pemimpin rakyat dan pemuka-pemuka masyarakat di Indonesia Timur dengan tujuan untuk menyusun suatu bentuk tata negara baru dalam rangka pelaksanaan garis politik pemerintah Belanda yang telah diumumkan pada tanggal 10 Februari 1946.

Penempatan Sulawesi Selatan sebagai pangkal pelaksanaan politik federal didasarkan atas pertimbangan pentingnya kedudukan Sulawesi Selatan dalam arti politik, ekonomis, dan geografis dalam hubungannya dengan Indonesia Timur dan Kalimantan. Tidak dapat disangkal bahwa Sulawesi Selatan pada waktu itu merupakan daerah yang paling banyak jumlah penduduknya jika dibandingkan

dengan daerah lainnya. Juga kota Makassar merupakan kota terpenting dalam perjalanan sejarah selama itu, baik sebagai pusat kehidupan ekonomi, maupun sebagai pusat kegiatan politik di wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Belanda memandang perlu untuk menguasai Sulawesi Selatan. Terlebih lagi pergolakan yang terjadi di Sulawesi Selatan memiliki dampak politik bagi daerah lain di Indonesia Timur dan Kalimantan.

Negara Indonesia Timur dirancang oleh Letnan Gubernur Jenderal van Mook sebagai usaha untuk melemahkan potensi RI di luar pulau Jawa dan Sumatera. Pembentukan ini sekaligus merupakan konsensi van Mook terhadap gagasan semula dari pihak Kerajaan Belanda pada tahun 1942 yang menganggap kemerdekaan bagi bangsa Indonesia masih merupakan suatu hal yang belum terjangkau. (Leirissa, 1978)

Sebagai langkah awal, maka van Mook memprakarsai satu konferensi di bagian selatan kota Makassar, tepatnya di daerah peristirahatan Malino untuk membicarakan bentuk dan pelaksanaan negara federal pertama tersebut. Konferensi Malino yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 25 Juli 1946, menyalahi kesepakatan yang ada sebelumnya antara pemerintah RI dan pihak Kerajaan Belanda, dimana seharusnya pembentukan "negara-negara bagian" seperti halnya NIT, seharusnya mengikutsertakan kedua belah pihak. Karena tidak dibenarkan dan banyak mendapat protes dari pihak Republik. Konferensi yang diwakili 39 orang dari 15 daerah ini, mengeluarkan beberapa resolusi yang intinya persetujuan pembentukan sebuah negara federal dalam wilayah Republik Indonesia, dan memutuskan untuk membangun kembali ketatanegaraan Hindia Belanda sebagai satu keseluruhan dari Indonesia seluruhnya yang meliputi federasi (Negara Indonesia Serikat). (Najamuddin., 2000.)

H.J. van Mook menyampaikan pidatonya pada pembukaan konferensi Malino bahwa hanya dengan bersatunya seluruh Indonesia dapat menjamin tercapainya dasar teguh untuk menentukan nasib diri sendiri. Serta bisa mendapatkan tempat diantara bangsa-bangsa yang ada di dunia yang kuat perekonomiannya. (Penerangan., 1953.) Tentang bentuk kesatuan dan federasi, menurut van Mook dalam pidatonya tersebut menyatakan bahwa Negara Kesatuan memerlukan lebih sedikit biaya dan tenaga-tenaga pimpinan yang diperlukan, dibanding dengan Negara yang berstruktur Federasi. Hanya saja dalam suatu Negara Kesatuan memiliki resiko golongan-golongan (bahagian-bahagian) tertentu akan menguasai bahagian-bahagian lainnya sehingga akan timbul perpecahan di dalamnya dan akan mendatangkan bahaya bagi kesatuan tersebut. Sebaliknya, dalam suatu Negara Federasi dapat dijamin kehidupan-kehidupan dari segenap golongan-golongan (bahagian-bahagian) dan dengan demikian akan dapat ditempatkan pada suatu pembagian tugas yang tepat antara pemerintah pusat di satu pihak dan daerah-daerah di lain pihak.

Pembentukan federasi di seluruh Indonesia direncanakan terdiri dari 4 bahagian, yaitu: Jawa, Sumatera, Borneo dan Timur Besar, dengan syarat bahwa berhubungan dengan putusan-putusan dalam daerah-daerah yang bersangkutan, dna dengan mandat-mandat dari wakil-wakil mereka, akan dibicarakan lagi tentang: Pertama, masuknya pulau-pulau Sunda kecil dalam Timur besar, atau pembentukan kepulauan sunda kecil dari satu atau lebih bahagian-bahagian federasi (negara-negara). Kedua, masuknya *Zelbestuur-zelbestur* di Borneo Timur ke Borneo. Mengenai bentuk negara apakah baiknya berbentuk kesatuan atau federasi, kebanyakan wakil-wakil daerah memilih bentuk federasi. Tetapi, ada juga beberapa yang mengemukakan kesatuan. Salah satunya yakni wakil dari Maluku Utara yang mengemukakan "satu Indonesia" dan seorang lagi perwakilan

dari Minahasa yang mengemukakan perkataan "Indonesia raya". Sedangkan wakil dari Sulawesi Selatan mengemukakan hal sebaliknya. Menurutnya lebih baik apabila mengikuti bentuk pemerintahan Amerika Serikat, suatu negara kesatuan yang federative dan merdeka, terdiri dari negara-negara yang berdiri sendiri dan langsung memerintah daerahnya. Menurutnya, bentuk federasi bisa menimbulkan kesesuaiannya dan pemecahan dalam berbagai hal yang diperlukan, lantaran kemudahannya dibandingkan negara kesatuan.

Gagasan untuk membentuk negara serikat (negara yang terdiri dari negara bagian) sebenarnya sudah direncanakan oleh van Mook sebelum kemerdekaan RI. Maka tidaklah mengherankan apabila tokoh-tokoh Republik yang Sebagian besar merupakan pejuang pergerakan nasional menentang gagasan ini. Karena federalisme yang diinginkan oleh van Mook itu harus dipimpin oleh Belanda. Oleh karena itu, Konferensi Malino tidak mendapat sambutan yang baik dari kalangan Republik Indonesia. Konferensi Malino dianggap sebagai suatu usaha pihak Belanda untuk mendapatkan dukungan dari wakil-wakil daerah diluar Jawa sebagai strategi untuk memecah belah bangsa Indonesia

Konferensi Malino ini tidak dibenarkan oleh RI karena seharusnya pembentuk "negara-negara bagian" dilakukan bersama-sama dengan RI berdasarkan kesepakatan sebelumnya, oleh karena itu Mohammad Hatta sebagai wakil dari pemerintah RI pada radio Yogyakarta tanggal 17 Juli 1946 menganggap konferensi ini hanya dipaksakan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang digambarkannya konferensi itu berlangsung diujung bayonet. Pernyataan Mohammad Hatta itu mendapat tanggapan serius dari peserta konferensi karena dianggap suatu penghinaan terhadap wakil-wakil rakyat dari konferensi Malino, dimana konferensi itu menurut peserta dilaksanakan atas keinginan dari wakil-wakil itu sendiri. Tanggapan peserta konferensi dikirim ke pers untuk diumumkan dan ditandatangani oleh Sonda Daeng Mattajang (Sulawesi Selatan), Soekawati (Bali), Sultan Hamid II (Borneo Barat), dan Dengah (Minahasa). Tanggapan pemerintah RI tersebut, tidak diperhatikan dan bahkan pada bulan Desember 1946 terbentuklah Negara Indonesia Timur yang disahkan dalam konferensi Denpasar.

b. Konferensi Denpasar

Konferensi Denpasar yang diadakan di Denpasar Bali merupakan lanjutan dari konferensi Malino. Konferensi ini dimulai pada tanggal 7 Desember 1946 yang membicarakan status Timur Besar di dalam ketatanegaraan yang baru. Konferensi yang berlangsung sampai 24 Desember 1946 itu juga diketuai oleh Van Mook.

Konferensi Denpasar dihadiri oleh wakil-wakil dari Sulawesi Selatan (21), Maluku Selatan (5), Timor (3), Flores (3), Sumba (3), Sumbawa (3), Maluku Utara (2), Bali (7), Lombok (5), Minahasa (13), Sangi dan Talaud (3), dan Sulawesi Utara (3). pembicaraan dalam konferensi tersebut dipusatkan pada satu masalah pokok yakni rencana pembentukan susunan ketatanegaraan di wilayah Timur Besar dengkap dengan personil pejabat (Presiden dan Ketua DPRS) serta peraturan-peraturannya.

Sebelum dilaksanakan Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946. Pada tanggal 15 November 1946 Pemerintah Belanda yang diwakili Schermerhorn dan Sutan Syahrir dari Indonesia menandatangani persetujuan penyelesaian masalah Indonesia-Belanda yang disebut "Persetujuan Lingarjati" yang berisi tentang: (1) Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal yang dinamakan negara Indonesia Serikat (NIS). (2). NIS akan berkerjasama dengan pemerintah kerajaan Belanda untuk membentuk sebuah uni Indonesia Belanda. (Nugroho Natosusanto, 2008)

Konferensi Denpasar berlangsung setelah Persetujuan Linggarjati pada tanggal 15 Nopember 1946. Setelah naskah persetujuan disahkan pada tanggal 20 Desember 1946, maka van Mook dapat leluasa bertindak membentuk Negara Indonesia Timur yang tidak bertentangan dengan semangat dan jiwa Persetujuan Linggajati. Pihak peserta konferensi yang pro Republik pun ikut mendukung pembentukan Negara Indonesia Timur karena naskah Persetujuan Linggajati itu menegaskan bahwa "Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsurang dan dengan kerja bersama antara kedua belah pihak akan dimasukkan ke dalam Daerah Republik.

Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT), menurut Van Mook bahwa Indonesia Timur akan dapat menjelma menjadi suatu negara yang mempunyai daya hidup yang kuat dan akan dapat mengembangkan identitasnya sendiri sehingga akan berhasil merupakan suatu bagian yang berharga dari federasi Indonesia yang akan diwujudkan sebagaimana yang diinginkan semua pihak. Pada akhir Konferensi Denpasar 24 Desember 1946, terbentuklah negara baru yang dinamakan Negara Indonesia Timur dalam wadah Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara) dan Kepulauan Maluku. (Agung, 1985) Pada tanggal 24 Desember 1946 berdasarkan peraturan ketatanegaraan yang telah diterima dalam konferensi diumumkanlah berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) yang meliputi bekas wilayah Timur Besar kecuali Irian Barat.

Konferensi Denpasar itu memilih Cokorda Gde Raka Sukawati sebagai Kepala Negara Indonesia Timur pertama (mantan anggota Volksraad dari partai PEB), Perdana Menteri adalah Nadjamoedin Daeng Malewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian, dan ketua DPRS terpilih Mr. Tadjoeidin Noer. Hanya kaum republikan berpendapat bahwa pembentukan Negara Indonesia Timur dalam rangka pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat hanya merupakan satu tahap dalam proses perjuangan menuju Negara Republik Indonesia sesuai dengan semangat proklamasi 1945. Sementara mereka yang mendukung federalisme, memang menganggap Negara Indonesia Timur sebagai tujuan dalam rangka pembentukan Negara Federal yang tetap berada dalam lingkungan Kerajaan Belanda. (Rustam Hasyim, 2015)

3. Reaksi Para Pemuda di Takalar Dalam Terbentuknya NIT

Keinginan untuk kelak membentuk negara federasi hasil Konferensi Malino, mendapat tanggapan penolakan dari pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan. Karena itu pejuang-pejuang di Sulawesi Selatan lebih giat melancarkan perlawanan dan serangan untuk mematahkan kekuasaan dan menghancurkan kedudukan Belanda. Usaha yang dilakukan ternyata berhasil. Keberhasilan perjuangan itu bukan hanya dinyatakan oleh R.W. Mongisidi "lapisan masyarakat pada umumnya 98% menghendaki Negara Kesatuan Indonesia (eenheids staat) dalam bentuk republik. Ini adalah suatu kenyataan sampai akhir tahun 1946".

Pihak pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan mengakui bahwa kedudukan kekuasaannya semakin merosot dan hampir tidak berdaya akibat semakin meningkatnya perlawanan dan serangan rakyat terhadap kedudukannya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Belanda yang berkedudukan di Makassar memohon bantuan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar mengirimkan bantuan militer dan menyatakan daerah Sulawesi Selatan berlaku hukum "keadaan perang".

Dengan penangkapan pimpinan PKRS, Dr. Ratulangi dan sejumlah staf PKRS oleh pihak NICA pada 5 April 1946, dianggap akan dapat mengurangi perlawanan

rakyat Sulawesi Selatan. Pemikiran ini didasarkan oleh kenyataan bahwa seluruh pimpinan pemerintah lokal di Sulawesi Selatan mendukung sepenuhnya kedudukan Ratulangi. Selain itu, juga dipandang sangat berarti pergolakan rakyat di daerah Sulawesi Selatan untuk memperjuangkan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-hatta. Kenyataannya menunjukkan bahwa setelah Ratulangi dan kawan-kawannya ditawan, kegiatan politik diambil oleh Tajuddin Noor dengan kegiatan organisasi pemuda Nasional Indonesia (PNI) yang telah didirikan pada awaln Januari 1946 atas anjuran Ratulangi. Di lain pihak kelaskaran-kelaskaran yang selama ini berjuang secara terpisah di daerah masing-masing dengan tujuan yang sama untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan dan menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan dan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam satu wadah.

Nafsu musuh hendak mendirikan negara boneka, Belanda yang diprakarsai oleh van Mook, semakin bertambah kuat dan jelas. Sehubungan dengan akan diadakannya konferensi, para pendukung van Mook di Malo pada akhir bulan Juli 1946. Ranggong Dg. Romo amat geram hatinya mendengar peristiwa tersebut, maka segera mengutus kepercayaannya memanggil pimpinan kelaskaran baik yang berdiam di dalam kota maupun di daerah pedalaman. Penentuan hari pertemuan para pimpinan kelaskaran telah ditetapkan oleh Ranggong Dg. Romo bersama stafnya, undangan lisan disampaikan ke Kota Makassar maupun daerah pedalaman melalui kurir. (Pawiloy, 1987)

Untuk memberikan dukungan keamanan terhadap tempat pertemuan para pejuang di Polongbangkeng, maka dilakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda, dengan demikian patrol musuh menghentikan gerakannya dan tinggal di posnya masing-masing. Dalam keadaan rasa aman terhadap patrol musuh, para pemimpin kelaskaran berangkat menuju Polongbangkeng.

E. KESIMPULAN

Reaksi masyarakat Takalar terhadap kedatangan Sekutu yang membonceng NICA tentunya menimbulkan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan rencana NICA yang hendak menegakkan kembali kekuasaan dan pemerintah Belanda di Sulawesi Selatan, berusaha mengorganisasikan kesatuan komando dalam satu wadah. Para pejuang yang ada di Takalar mati-matian mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia, bukan menjadi Negara boneka Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman hamid. (2016.). "Nasionalisme Dalam Teror di Mandar Tahun 1947" . *paramita Vol. 26 No. 1*, Hlm. 35.
- Agung, I. A. (1985). *Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Hlm. 199. Yogyakarta:: Gadjah Mada.
- Ahmadin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Hlm. 8. Makassar: Rayhan Intermedia.
- Amir, M. (2010). "Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950". *Jurnal Patanjala Volume 2 No. 2*, , Hlm. 1.
- Amir, M. (2010.). "Dari Federalis ke Unitaris: Studi Kasus Sulawesi Selatan 1945-1950". . *Jurnal Patanjala Volume 2 No. 2*,, Hlm. 342.
- Bahtiar. (2014). *TRIPS Dalam Perjuangan Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan di Sulawesi Selatan 1945-1950*. Hlm. 2. Makassar:: De La Macca.

- Daliman., A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah. Cetakan III. Hlm. 73*. Yogyakarta: Ombak.
- Gde., I. A. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Hlm. 1*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, .
- Harun Kadir, d. (1984). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950). Hlm. 98*. Ujung Pandang: Kerjasama BAPPEDA Tk I Propinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin.
- Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah. Hlm. 86*. . Yogyakarta: Ombak.
- kartodirdjo, S. (2015). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. hlm. X*. . Yogyakarta:: Ombak.
- Leirissa, R. (1978). "Pemberontakan Republik Maluku Selatan". In *Prisma-LP3ES* (p. Hlm. 31). Jakarta: Prisma.
- Leonardo. (2007). Pembentukan dan Pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat 1949-1950. In *Skripsi* (p. Hlm. 1). Yogyakarta.
- Marthabaya, M. R. (1987). *Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi 17-08-1945. Hlm. 1*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Najamuddin, B. (2017, 12). "Terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) Di Sulawesi Selatan 1946-1950" *Hlm. 390-395*. Retrieved from proceeding of national seminar: <https://ojs.unm.ac.id/semnaslemlit/article/view/4046>
- Najamuddin. (2000.). Sulawesi Selatan: Pergumulan Antara Negara Federal dan Negara Kesatuan 1946-1950. In *Tesis Program Studi Ilmu Sejarah Bidang Ilmu Budaya Program Pascasarjana Universitas Indonesia*. (p. Hlm. 89). Jakarta.
- Nugroho Natosusanto, M. D. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia. Hlm. 269*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pawiloy, S. (1987). *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan, Arus Revolusi Sulawesi Selatan. hlm. 125*. Ujung Pandang:: Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Propinsi Sulawesi Selatan. .
- Penerangan., K. (1953.). Makassar: Djawatan Penerangan R.I. Propinsi Sulawesi. Propinsi Sulawesi.
- Ricklefs, M. (1994.). *Sejarah Indonesia Modern. Hlm. 323*. Yogyakarta:: Gadjah Mada University Press.
- Rustam Hasyim, M. M. (2015). "Sultan Ternate Jabir Syah: Dari Konferensi Malino Hingga Menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT) 1946-1950". *Jurnal Etnohistori Vol. II No.1*. , Hlm 29-30.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah. Hlm. 103*. Yogyakarta: Ombak.